

DEMOKRATISASI PENDIDIKAN: TINJAUAN TEORETIS DAN PANDANGAN ISLAM

Ali Masykur Tanjung

UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

Alimasykur.tanjung@gmail.com

Abdul Sahib

IAIN Curup Bengkulu

abdulsahib474@gmail.com

Abu Muslim

Pusat Riset Khazanah Keagamaan dan Peradaban

abumuslim.litbang@gmail.com

Article History:

Received: Agustus, 31, 2024

Accepted: September 27, 2024

Published: Oktober, 13, 2024

Abstract. *This research explores the concept of democracy in education from a theoretical perspective and Islamic views. Educational democracy includes active participation of all parties in the educational process, critical development, and respect for diversity. In Islam, education plays a role in forming the character of individuals who have noble character and broad knowledge. This research uses a qualitative method with a descriptive-analytical approach through literature study. The research results show that democracy in education is in harmony with Islamic values which prioritize justice, equality and social responsibility.*

Keywords:

Democratization, education, Islam views

Abstrak. Penelitian ini mengeksplorasi konsep demokrasi dalam pendidikan dari perspektif teoretis dan pandangan Islam. Demokrasi pendidikan mencakup partisipasi aktif semua pihak dalam proses pendidikan, pengembangan kritis, dan penghargaan terhadap keragaman. Dalam Islam, pendidikan berperan dalam membentuk karakter individu yang berakhlak mulia dan berpengetahuan luas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa demokrasi dalam pendidikan memiliki keselarasan dengan nilai-nilai Islam yang mengedepankan keadilan, kesetaraan, dan tanggung jawab sosial.

A. PENDAHULUAN

Sebagaimana diyakini oleh umat Islam, bahwa Islam adalah agama yang sarat dengan ajaran yang bernilai dan bermanfaat bagi kehidupan manusia dan kelangsungannya, sebagai bagian dari rahmatan lil-'alamien. Di antara

yang terpenting adalah komitmen Islam terhadap pelaksanaan pendidikan. Berkaitan dengan upaya peningkatan aspek pendidikan, secara rasional, tidak seorangpun di dunia ini yang tidak menyetujui, mulai lapisan masyarakat kelas bawah hingga ke lapisan yang paling tinggi, yakni para pemegang pemerintahan (Rohman, 2014). Sejak awal perkembangan Islam, pendidikan mendapat prioritas utama masyarakat muslim Indonesia, di samping karena besarnya arti pendidikan, kepentingan Islamisasi mendorong umat Islam melaksanakan pengajaran Islam kendatipun dalam sistem yang masih sangat sederhana, di mana pengajaran diberikan dengan sistem halaqah yang dilakukan di tempat-tempat ibadah semacam masjid, mushala, bahkan juga di rumah (Hasnida, 2017).

Bagi masyarakat demokratis, pendidikan merupakan komponen vital. Dikatakan demikian karena atribut-atribut warga negara yang demokratis dibina melalui pendidikan. Berbeda dengan masyarakat otoriter yang menuntut penerimaan warga secara pasif (*passive acceptance*), tujuan pendidikan demokrasi adalah menghasilkan warga negara yang merdeka, berpikir kritis dan sangat familiar dengan pandangan dan praktek-praktek demokrasi (Suryadi, 1999).

Pada kondisi Negara yang memiliki masyarakat heterogenitas, cenderung menerapkan sistem demokrasi dalam menjalankan roda pemerintahan. Konteks demokrasi secara sederhana menunjukkan adanya pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Prinsip utama dalam penerapan alam demokrasi adalah adanya pengakuan atas kebebasan hak individual terhadap upaya untuk menikmati hidup, sekaligus dalam mekanisme menjalankan kewajiban sebagai warga negara. Sehingga, pada gilirannya dapat membentuk kondisi *community development* pada nilai-nilai keberagaman, baik berpikir, bertindak, berpendapat, maupun berkreasi. Agar semakin demokratis pelaksanaan pendidikan suatu Negara, akan memberikan implikasi pada peningkatan taraf kepedulian masyarakat terhadap hak dan kewajibannya dalam menggunakan pikiran, tenaga, dan suaranya. Impact yang sangat kuat dari penerapan demokrasi pendidikan yaitu berkembangnya

keberagaman pola pikir masyarakat, kreatifitas, dan daya inovasi yang tinggi. (Martina et al., 2023).

Demokrasi sejati membutuhkan hukum, peraturan, lembaga yang menegakkannya, dan sikap demokratis. Sikap demokratis di dalamnya terkandung kebesaran hati untuk mengakui kesalahan, kesediaan untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat luas, dan mampu mengkombinasikan semangat untuk menegakkan pendiriannya serta kompromi dengan kesadaran bahwa seseorang tidak dapat mewujudkan semua yang diinginkan, dan kombinasi antara kesadaran individu dengan kelompok. Secara substantif berdimensi panjang untuk mendidik warga negara yang baik guna menjamin terwujudnya masyarakat demokratis, pendidikan demokrasi mutlak diperlukan.

Pendidikan demokrasi bertujuan mempersiapkan warga masyarakat berfikir kritis dan bertindak demokratis, melalui aktivitas menanamkan pada generasi baru yang menyadari akan tiga hal. Pertama, demokrasi adalah bentuk kehidupan bermasyarakat yang paling menjamin hak-hak warga negara. Kedua, demokrasi adalah suatu learning process yang tidak dapat begitu saja meniru dari masyarakat lain. Ketiga, kelangsungan demokrasi tergantung pada keberhasilan menstransformasikan nilai-nilai demokrasi (kebebasan, persamaan dan keadilan, serta loyal kepada sistem politik yang bersifat demokratis (Sihono, 2017).

Pendidikan demokrasi dapat dipahami sebagai suatu proses sosialisasi, internalisasi, dan aktualisasi konsep, dan nilai-nilai demokrasi melalui proses pembelajaran berlangsung. Dalam hal ini, upaya untuk menciptakan sistem pendidikan yang demokratis menjadi keharusan yang perlu disikapi secara positif oleh seluruh praktisi pendidikan. Sistem demokratisasi pendidikan akan berjalan dengan baik sesuai koridor apabila semua warga negara memahami, menyadari, dan mendukung proses tersebut. Dapat dipahami demokratisasi pendidikan Islam adalah suatu proses mewujudkan suasana demokratisasi pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai keislaman. Dalam mewujudkan demokratisasi pendidikan Islam maka harus melibatkan berbagai praktisi

pendidikan termasuk di dalamnya adalah kerjasama warga negara dalam memahami proses demokratisasi pendidikan Islam (Mardani et al., 2023).

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Data dikumpulkan melalui studi literatur yang mencakup teori-teori pendidikan demokratis dan literatur Islam dalam pendidikan. Analisis dilakukan dengan meninjau konsep-konsep utama dan keselarasan antara demokrasi pendidikan dan nilai-nilai Islam.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Demokratisasi Pendidikan

Kata demokratisasi berakar dari kata demokrasi. Demokratisasi berarti sebagai proses daripada demokrasi atau pendemokrasian. Kata demokrasi, dalam bahasa Inggris *democracy*, adalah salah satu kata terpenting dalam kamus politik. Kata ini sebenarnya diambil dari bahasa Yunani, yaitu *demos* berarti people (rakyat) dan *krateein* berarti *to rule* (menguasai, memerintah), (*The New International Webster's Dictionary of The English Language*, 1997) dan ia sudah dikenalkan oleh pemikir-pemikir Yunani kuno sejak empat abad sebelum masehi, namun istilah kata ini baru dikenal kembali pada abad ke 18 yaitu pada saat tercetusnya revolusi Perancis dan kemerdekaan Amerika Serikat (Soedarjito, 2003).

Hampir semaksud dengan pengertian ini adalah pengertian yang dirumuskan oleh Prof. Dr. Soedijarto, yaitu sebagai berikut :

"Demokrasi adalah suatu konsep politik yang mengandung pengertian tentang suatu sistem politik yang menganut pemahaman penyelenggaraan pemerintahan negara yang pemerintahannya dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan didasarkan atas persetujuan yang diperintah" (Soedarjito, 2003).

Dari uraian-uraian tentang pengertian demokrasi tersebut, dapatlah diambil suatu pengertian dasar bahwa di dalam penyelenggaraan pemerintahan, keterlibatan rakyat merupakan kata kunci, karenanya hak-

hak asasi setiap warga masyarakat, yang meliputi life (kehidupan), liberty (kebebasan) dan property (kepemilikan) harus mendapatkan jaminan secara adil, sehingga terwujudlah 'persamaan' (al-musawah) bagi setiap warga baik secara politik, hukum maupun sosial (Madjid, 1997). Jadi, adil dan persamaan adalah pilar-pilar utama, di samping kebenaran, kejujuran, keterbukaan dan semacamnya dalam bangunan demokrasi.

Selanjutnya, setelah difahaminya makna demokrasi di atas, maka demokrasi dan demokratisasi atau usaha pendemokratisasian adalah suatu ide dan usaha yang sangat baik dan terpuji, terlebih lagi bila dikaitkan dengan pendidikan. Hal ini difahami mengingat bahwa pendidikan adalah bagian terpenting dalam membangun kehidupan. Sebagaimana Disebutkan dalam pasal 3 UUD 1945, bahwa: "Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia dalam rangka upaya mewujudkan tujuan nasional." Melalui proses pendidikan seseorang, sekelompok orang atau satu bangsa dapat meningkatkan kualitas-dirinya, baik secara kognitif, afektif maupun psikomotorik (Muhajir, 1987).

Berkaitan dengan ini pula, secara lebih praktis dan implisit John Dewey menyampaikan pendapatnya sebagai berikut:

"A democracy is more than a form of government; it is primarily a mode of associated living, of conjoint communicated experience. The extension in space of the number of individuals who participate in an interest so that each has to refer his own action to that of others, and to consider the action of others to give point and direction to his own, is equivalent to the breaking down of those barriers of class, race and national territory which kept men from perceiving the full import of their activity (Dewey, 1964).

Dalam konteks Indonesia, sebagai contoh, masalah demokratisasi pendidikan mempunyai landasan konstitusional, di mana disebutkan pada Pasal 31 Ayat (1) UUD 1945 bahwa, "Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan".(Soedarjito, 2003). Dengan demikian berarti pemerintah berkewajiban memperlakukan setiap warga negara secara adil dalam menggunakan haknya untuk memperoleh pendidikan. Untuk itu

idealnya pemerintah harus mampu menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang mumpuni, sehingga setiap warga negara dapat menggunakan haknya dalam memperoleh pendidikan yang layak sesuai ketentuan wajib belajar yang diberlakukan. Namun, kenyataan yang terjadi tidaklah demikian.

Hal ini terbukti antara lain, dengan masih banyaknya anak umur sekolah yang tak dapat bersekolah karena banyaknya pungutan uang di luar ketentuan. Inilah kelemahan pemerintah kita yang ternyata belum berhasil dalam pelaksanaan demokratisasi pendidikan. Jadi, inti dari pada demokratisasi pendidikan adalah pemberian kesempatan yang terbuka bagi setiap individu (warga negara) untuk memperoleh pendidikan yang layak sesuai dengan ketentuan konstitusional tanpa adanya bentuk diskriminasi apapun (ekonomi, sosio-budaya, politik, agama, etnis dan ras).

2. Islam dan Pendidikan

Setiap muslim meyakini bahwa agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. itu adalah agama yang sempurna. Al-Qur'an sebagai sumber utamanya diyakini sebagai kitab suci yang berisi petunjuk dan pedoman yang lengkap. Oleh karenanya, Al-Qur'an menyatakan dirinya sebagai kitab petunjuk yang membimbing manusia ke arah jalan hidup yang paling lurus. Selain Al-Qur'an adalah Hadits/Sunnah Nabi yang dijadikan sebagai sumber utama yang kedua.

Hadits/Sunnah Nabi berfungsi sebagai penjelas Al-Qur'an; menjelaskan makna-makna atau maksud-maksud yang terkandung dalam Al-Qur'an yang masih bersifat umum atau global, seperti menerangkan masalah tata cara shalat, puasa dan haji, dan juga masalah bermuamalah (berinteraksi) dalam kehidupan sehingga setiap individu mampu berperan secara aktif, positif dan akurat.. Dari paparan uraian tersebut dapat ditarik suatu pengertian, bahwa Al- Qur'an dan Al-Sunnah, sebagai petunjuk bagi umat manusia memuat nilai-nilai luhur yang mendorong manusia agar selalu meningkatkan kualitas dirinya dengan berbekal ilmu

pengetahuan (belajar/mencari ilmu), sehingga menjadi orang-orang yang selalu dalam petunjuk Allah (al-muhtadin). Oleh karena itu, sejak awal kenabian, Nabi Muhammad SAW Sudah melakukan aktivitas-aktivitas pembelajaran-pengajaran (pendidikan) (Hasan, 1964).

Secara kronologik dapat dikemukakan, bahwa Nabi pernah memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk belajar membaca dan menulis di bawah bimbingan para tawanan perang (non-Muslim), yaitu dibebaskannya setiap tawanan setelah ia mengajar sepuluh orang muslim membaca dan menulis (Amin, 1975). Dalam periode-periode berikutnya tradisi belajar-mengajar ini menurun ke-generasi-generasi berikutnya, yaitu para sahabat Nabi dan pengikut-pengikutnya (*tabi'in*). Dalam suatu riwayat disebutkan, bahwa Jabir, sahabat Nabi, pernah melacak kesahihan sebuah hadits dengan melakukan perjalanan panjang ke Negeri Syam (Sekarang Syria/Suriah) dalam tempo dua bulan (Fayed, 1970).

Pada abad pertengahan, yang dikenal dengan the *Golden Ages*, sementara Eropa sedang mengalami kegelapan (*the Dark Ages*), Baghdad dan Kuffah menjadi pusat peradaban di mana di kedua kota tersebut para ilmuwan berkumpul tanpa adanya diskriminasi. Mereka terdiri dari orang-orang Arab dan Non-Arab, dari orang-orang Islam, Kristen, Yahudi dan Majusi (Mursiy, 1975). Sementara itu Khalifah Harun al-Rasyid menerima pajak kepala dengan ukuran buku, dan al- Ma'mun, puteranya, membayar penerjemah dengan emas seberat bukunya. Kemudian di belahan barat bumi Islam, yaitu Spanyol (Andalusia), kegiatan pendidikan pun berlangsung dengan semaraknya. Di bawah pemerintahan al-Hakam (961-976), dibangunlah 27 sekolah di Ibu Kota Negara dan dibangun juga Universitas Cordova, sebagai Universitas tertua di dunia, (Hoesin, 1975) dengan perpustakaan yang begitu megah yang memiliki 400 ribu naskah, dan judul-judulnya dihimpun dalam katalog-katalog yang berjumlah 44 jilid (Umar, 1975).

Dari kenyataan-kenyataan yang teruraikan di atas, maka jelaslah bagi kita, bahwa Islam sangat mendorong umatnya untuk selalu belajar,

mencari ilmu pengetahuan, menguasainya dan kemudian berusaha untuk mengembangkannya. Semuanya itu semata-mata sebagai pengejawantahan seorang hamba dalam kerangka beribadah kepada Allah SWT. Dengan demikian maka dapatlah dikatakan bahwasannya Islam itu mempunyai kaitan yang sangat erat dengan praktek-praktek pendidikan. Adapun masalah rendahnya kualitas pendidikan kebanyakan umat Islam sekarang ini adalah disebabkan oleh banyak faktor, baik faktor-faktor internal umat maupun eksternal. Untuk membahas masalah ini perlu dilakukan suatu pengkajian tersendiri yang khusus untuk itu.

3. Perspektif Islam tentang Demokratisasi Pendidikan

Demokratisasi pendidikan dalam Islam merupakan konsep yang mengacu pada upaya untuk memastikan bahwa pendidikan dalam konteks Islam dapat diakses oleh semua individu tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau jenis kelamin mereka. Konsep ini berakar dalam nilai-nilai Islam yang menekankan keadilan, kesetaraan, dan hak setiap individu untuk mendapatkan Pendidikan (Martina et al., 2023). Keberadaan demokrasi dalam pendidikan Islam, tentu saja tidak dapat dilepaskan dari sejarah atau demokrasi dalam ajaran Islam dan demokrasi secara umum. Demokrasi dalam ajaran Islam secara prinsip telah diterapkan oleh Nabi Muhammad saw yang dikenal dengan istilah “musyawarah”. Kata demokrasi memang tidak terdapat di dalam al-Qur’an dan al-Hadith, karena kata demokrasi berasal dari Barat atau Eropa yang masuk ke peradaban Islam.

Prinsip demokrasi pendidikan Islam dijiwai oleh prinsip demokrasi dalam Islam, atau dengan kata lain demokrasi pendidikan Islam merupakan implementasi prinsip-prinsip demokrasi Islam terhadap pendidikan Islam. Bentuk demokrasi pendidikan Islam adalah sebagai berikut: *Pertama*, kebebasan bagi pendidik dan peserta didik. Kebebasan ini mencakup kebebasan berkarya, kebebasan dalam mengembangkan potensi, kebebasan dalam berpendapat. *Kedua*, persamaan terhadap peserta didik dalam pendidikan Islam. Islam memberikan kesempatan yang sama bagi semua

peserta didik untuk mendapatkan pendidikan atau belajar. Pendidik harus mengajar anak orang yang tidak mampu dengan yang mampu secara bersama atas dasar penyediaan kesempatan belajar yang sama bagi semua peserta didik. Pendidik harus mampu memberikan kesempatan yang sama kepada semua peserta didik untuk mendapatkan pendidikan. *Ketiga*, penghormatan akan martabat individu dalam pendidikan Islam. Demokrasi sebagai penghormatan akan martabat orang lain, maksudnya adalah seseorang akan memperlakukan orang lain sebagaimana dirinya sendiri. Secara historis prinsip penghormatan akan martabat individu telah ditunjukkan oleh Nabi Muhammad saw dalam praktek pembebasan kaum tertindas di Mekkah seperti memerdekakan budak (Fahmi, 2016).

Berdasarkan pandangan teologis, demokratisasi pendidikan bukanlah sekedar anjuran, akan tetapi ia merupakan sesuatu yang bersifat imperatif, perintah. Mengapa demikian? Karena demokratisasi pendidikan itu menyangkut masalah pembangunan manusia, sementara Al-Qur'an adalah kitab petunjuk bagi segenap manusia, yang berarti juga membangun manusia (Rohman, 2014a). Secara teologis Al-Qur'an mengatakan, dalam QS. Adz-Dzariyat : 56 :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya "Tidaklah Aku (Allah) ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdikan (beribadah) kepada-Ku." (QS. Adz-Dzariyat : 56).

Dari ayat ini difahami bahwa manusia dituntut oleh Allah bahwa untuk beribadah kepada-Nya, bukan kepada yang selain-Nya. Artinya, manusia diwajibkan untuk mengupayakan semua potensi dan kemampuan yang dimilikinya untuk kemaslahatan hidup secara luas semata-mata karena Allah. Agar amal ibadahnya mempunyai nilai (kualitas) yang tinggi, sebagaimana yang diharapkan Al-Qur'an, maka ia (manusia) perlu mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Berkaitan dengan ini, Rasulullah SAW. menegaskan dalam haditsnya yang sangat populer, bahwa mencari ilmu adalah wajib atas setiap Muslim dan Muslimah. Selanjutnya, ditemukan juga sebuah hadits beliau yang maksudnya: "Barangsiapa yang

menyembunyikan ilmu, maka ia (diancam) akan dipasangi mulutnya dengan kendali yang terbuat dari api." Dan masih banyak lagi ayat Al- Qur'an maupun teks hadits yang berbicara tentang ilmu dan pendidikan. Intinya adalah Islam memerintahkan agar setiap Muslim mencari ilmu (belajar), menguasainya dan menyebarkanluaskannya (semakna dengan demokratisasi) atas dasar ibadah, (Azra, 2000) dan sekaligus menebarkan rahmat dalam hal ini berupa pemberian kesempatan belajar sebagaimana yang dikehendaki Allah SWT. dalam Al-Qur'an.

Dalam uraian-uraian tersebut dapat ditarik pemahaman bahwa Islam memerintahkan bukan hanya menganjurkan umatnya untuk senantiasa meningkatkan kualitas-diri dengan berbekal ilmu pengetahuan, dan memberikan ancaman atas orang-orang yang tidak mau menyebarkanluaskan ilmu pengetahuan. Dengan demikian, maka pemahaman tersebut sejalan dengan ruh dari makna demokratisasi pendidikan. Berikut ini adalah uraian mengenai pandangan historis. Yang dimaksudkan di sini ialah memaparkan fakta-fakta kesejarahan yang membuktikan eratnya keterkaitan Islam dengan demokratisasi/ pendemokrasian pendidikan.

Setelah menelaah beberapa literatur, ditemukan banyak fakta kesejarahan yang membuktikan kuatnya komitmen (umat) Islam terhadap penyelenggaraan pendidikan secara terbuka, tanpa adanya diskriminasi. Sehubungan dengan ini Prof. Dr. Hasan Langgulung berkomentar :

"Sebenarnya faktor utama dari perkembangan dan tersiarnya kebudayaan Islam di antara bangsa-bangsa yang beragama lain adalah karena Islam adalah agama pertama kali mengakui bahwa setiap manusia berhak, malah diperintahkan untuk menuntut ilmu pengetahuan dan mempelajari kemahiran-kemahiran menurut kesukaan dan kecenderungannya. Sejarah peradaban-peradaban lain dari dulu sampai sekarang telah menunjukkan bahwa hak memperoleh ilmu pengetahuan adalah merupakan hak-hak golongan-golongan istimewa, kebanyakannya pendeta-pendeta, penguasa istimewa, dan golongan-golongan berharta."(Langgulung, 1985)

Pada awal sejarah Islam, Nabi memberikan pelajaran kepada para sahabatnya tanpa pilih-pilih. Beliau tanamkan rasa kebersamaan di antara

mereka. Beliau mengajarkan bahwasannya tiada perbedaan antara orang Arab dan orang non-Arab kecuali dengan ketaqwaannya. Beliau kembangkan tradisi pendidikan dengan semangat yang sangat tinggi, sehingga menjadikan masjid tidak hanya untuk melakukan sholat, tetapi masjid juga dijadikan sebagai tempat belajar bagi semua lapisan masyarakat Muslim Madinah. (Azra, 2000) Pada abad-abad pertengahan banyak orang Kristen yang belajar di Universitas Cordoba, kemudian mereka membawa pulang ilmu dan kebudayaan ke negeri-negeri asal mereka. Di antara mereka adalah Gerbert, yang kemudian hari menjadi Paus Sylvester II, yang telah banyak memperkenalkan ilmu pasti kepada Eropa. (Poeradisastra, 1986) Dan pada masa yang sama di Baghdad mahasiswa-mahasiswa belajar di Universitas Mustanshiriyah dengan gratis, dan Maha-gurunya digaji menurut banyaknya mahasiswa. Di Universitas ini terdapat sebuah dapur umum yang menyajikan makanan-makanan yang lezat (roti dan daging). Di samping itu terdapat pula perpustakaan besar, klinik dan kolam renang. (Hoesin, 1975)

Dalam konteks Indonesia, kita dapat menyaksikan ribuan pondok pesantren yang berkembang demikian pesatnya, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Dinamika dan perkembangannya berlangsung sejak masuknya Islam di Indonesia hingga saat ini. Terlepas daripada plus-minus yang terdapat pada pondok pesantren, secara sosio-historis yang perlu dicatat dari keberadaannya adalah 'kemerakyatannya', sehingga menurut Nurcholis Madjid, secara historis pesantren tidak hanya identik dengan makna keislaman, tetapi juga mengandung makna keaslian Indonesia (indigenous). Hal ini dapat dilihat dari budaya yang dikembangkannya, antara lain yaitu ketaatan murid kepada guru (kyai), rasa persamaan, persaudaraan dan kesederhanaan dalam kehidupan sehari-hari. (Steenbrink, 1974)

Pesantren-pesantren yang ada hampir dapat dikatakan semuanya didirikan atas inisiatif para kyai secara pribadi dan dukungan masyarakat sekitarnya. Mendirikan pesantren bagi para kyai adalah merupakan

manifestasi dari pelaksanaan perintah Allah (ibadah) yang berkenaan dengan upaya mendidik dan mencerdaskan umatnya (nasyrul 'ilmi wa tahdzibul Ummah/menyebarluaskan ilmu dan mendidik umat).

Dari uraian-uraian tersebut dapat diambil pemahaman, bahwa demokratisasi pendidikan menurut Islam adalah suatu perkara yang sifatnya imperatif (perintah). Demikian ini secara jelas dapat dilihat dari sisi teologis dan dibuktikan sepanjang sejarah perkembangan Islam oleh Nabi, para sahabat, tabi'in dan para pengikutnya hingga sekarang ini.

D. Kesimpulan

Dari semua uraian yang telah disampaikan di muka, maka dapatlah dirumuskan butir-butir simpulan sebagai berikut: Bahwa demokratisasi pendidikan adalah satu ide atau gagasan konseptual penting yang berkenaan dengan usaha terpuji dalam rangka memberi kesempatan kepada setiap individu/warga negara untuk menggunakan haknya dalam memperoleh pendidikan yang layak. Bahwa meskipun di Indonesia demokratisasi pendidikan mempunyai landasan konstitusional (pada pasal 31 ayat (1) UUD 1945), namun pelaksanaannya masih jauh dari sempurna, dikarenakan masih banyak kebocoran pada anggaran peruntukannya dan lemahnya sistem penanganannya, sehingga banyak anak usia sekolah yang tak dapat bersekolah dikarenakan adanya pungutan-pungutan uang di luar ketentuan.

Bahwa Islam diyakini oleh umatnya sebagai agama pungkasan yang berisi petunjuk-petunjuk hidup yang lengkap - dengan Al-Qur'an dan Al-Sunnah sebagai sumber utamanya yang meliputi berbagai aspek termasuk pendidikan, baik secara teoritis, metodik maupun praktikal di mana Nabi dan para sahabatnya serta para pengikutnya telah melakukan peran-perannya di dalam sejarah pendidikan umat Islam sehingga menjadi tradisi yang turun-temurun (estafet). Bahwa melalui optimalisasi pengaktualisasian tradisi tersebut, maka pada abad pertengahan (umat) Islam telah mencapai puncaknya selama beberapa abad (the Golden Ages). Dan dari rahimnya dilahirkan ilmuwan-ilmuwan besar Muslim, seperti Ibnu Sina (Avicenna).

Ibnu Rusyd (Averroes) dan lain-lainnya yang akhirnya dapat mempengaruhi kehidupan bangsa Eropa untuk bangkit dari kegelapannya (Renaissance).

Bahwa Islam dengan jelas memandang demokratisasi pendidikan sebagai sesuatu yang imperatif. Mengingat Islam adalah agama yang pertama kali mengakui bahwa setiap manusia berhak, malah diperintahkan untuk menuntut ilmu pengetahuan dan mempelajari kemahiran-kemahiran menurut kesukaan dan kecenderungannya, dan Islam mencela bahkan mengancam orang-orang yang menyembunyikan ilmu pengetahuan (Hadits Nabi).

REFERENSI

- Amin, A. (1975). *Fajrul Islam*. Al-Nahdhah Al-Mishriyah.
- Azra, A. (2000). *Pendidikan Islam, Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*. Logos Wacana Ilmu.
- Dewey, J. (1964). *Democracy and Education, in Introduction to The Philosophy of Education*. The Macmillan Company.
- Fahmi, M. (2016). Pendidikan Islam, Demokratisasi dan Kewarganegaraan. *JOIES: Journal of Islamic Education Studies*, 1(1), 87–110.
- Fayed, Z. I. 'Abd al-'Aziz I. (1970). *Al-Din wa Al-'Ilm*. Dar al-Andalus.
- Hasan, I. H. (1964). *Tarikh al-Islam (I)*. Al-Nahdhah Al-Mishriyah.
- Hasnida. (2017). SEJARAH PERKEMBANGAN PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA PADA MASA PRA KOLONIALISME DAN MASA KOLONIALISME Pendahuluan Berita Islam di Indonesia telah diterima sejak orang Venesia (Italia) yang bernama Marcopolo singgah di kota Perlak dan menerangkan bahwa seb. *Jurnal Kordinat*, 16(2), 237–256.
- Hoesin, U. A. (1975). *Kultur Islam*. Bulan Bintang.
- Langgulung, H. (1985). *Pendidikan dan Peradaban Islam*. Pustaka Al-Husna.
- Madjid, N. (1997). *Tradisi Islam Peran dan Fungsinya dalam Pembangunan di Indonesia*. Paramadina.
- Mardani, D., Susiawati, I., & Sab'rina Fathimah, N. (2023). Islamic Management: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam KURIKULUM MERDEKA DALAM DEMOKRATISASI PENDIDIKAN ISLAM DI

INDONESIA. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 6, 25–36.
<https://doi.org/10.30868/im.v4i02.3310>

- Martina, M., Sarinda, F., Noviani, D., & Hilmin, H. (2023). Demokratisasi Pendidikan Dalam Islam. *Concept: Journal of Social Humanities and Education*, 2(4), 153–166.
- Muhajir, N. (1987). *Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial, Suatu Teori Pendidikan*. Rake Sarasin.
- Mursiy, A. S. (1975). *Tathawwur al-Fikr al-Tarbawiy*. 'Alam al-Kutub.
- Poeradisastra. (1986). *Sumbangan Islam Kepada Ilmu & Peradaban Modern*. P3M.
- Rohman, N. (2014a). Perspektif Islam tentang Demokratisasi Pendidikan. *Tarbawi*, 2(2), 58–59.
- Rohman, N. (2014b). PERSPEKTIF ISLAM TENTANG DEMOKRATISASI PENDIDIKAN. *Jurnal Tarbawi*, II(2).
- Sihono, T. (2017). Upaya Menuju Demokratisasi Pendidikan – Teguh Sihono. *Jurnal Ekonomi & Pendidikan*, 8(20), 1–22.
- Soedarjito. (2003). *Pendidikan Nasional sebagai Proses Transformasi Budaya*. Balai Pustaka.
- Steenbrink, K. A. (1974). *Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern*. LP35.
- Suryadi, K. (1999). Demokratisasi Pendidikan Demokrasi. *Mimbar Pendidikan*, 1, 23.
- The New International Webster's Dictionary of The English Language*. (1997). Trident Press International.
- Umar, A. M. (1975). *Islam di Spanyol*. Lembaga Penerbitan IAIN Yogyakarta.